



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NELSON PASARIBU
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 17932

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/67 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 249 m2/240 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/80 m2 di HUMBANG HASUNDUTAN, WARISAN Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 30000 m2 di HUMBANG HASUNDUTAN, WARISAN Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 15000 m2 di HUMBANG HASUNDUTAN, WARISAN Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 653.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 90.935.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 92.508.232

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. 6.750.000

**Sub Total**

Rp. 4.493.193.232



III. HUTANG

Rp. 150.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.343.193.232

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.